



SUPERVISI AKREDITASI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN MUTU SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (Studi Kasus Di Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Jawa Barat)

Abdul Muis

Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas
Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Abstrak

Program supervisi akreditasi dalam rangka pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF yang sesuai dengan SNP sangat penting dilakukan, karena hanya satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi saja yang mendapat beberapa keistimewaan. Supervisi akreditasi dilaksanakan dalam rangka pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF agar sesuai dengan SNP dan siap diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF di PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat pada tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan supervisi akreditasi dalam rangka pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF agar sesuai dengan SNP dan siap diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF. Hasil penelitian menggambarkan bahwa supervisi akreditasi dalam rangka pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF yang dilakukan di PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat pada tahun 2019 adalah dengan melakukan peningkatan pada pengelolaan, kinerja pendidik, kurikulum, serta sarana dan prasarana dari satuan PAUD dan PNF, agar sesuai dengan SNP dan siap diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF. Untuk menjamin ketercapaian tujuan keempat supervise tersebut dilakukan strategi dengan membuat skenario kegiatan Tahap 1 dan Tahap 2 serta alur pelaksanaan supervisinya.

Kata kunci: Supervisi; akreditasi; pengembangan mutu.

Diserahkan: 8 Januari 2022 Disetujui: 14 Januari 2022. Dipublikasikan: 14 Januari 2022

Kutipan: "

Abstract

The accreditation supervision program in the context of developing the quality of PAUD and PNF units in accordance with the SNP is very important, because only accredited PAUD and PNF units receive several privileges. Accreditation supervision is carried out in the context of developing the quality of PAUD and PNF units to comply with the SNP and ready to be accredited by BAN PAUD and PNF in PP PAUD and Dikmas West Java in 2019. The purpose of this study was to analyze the implementation of accreditation supervision in the context of developing the quality of PAUD units and PNF to comply with SNP and ready to be accredited by BAN PAUD and PNF. The results of the study illustrate that accreditation supervision in the context of developing the quality of PAUD and PNF units carried out at PP PAUD and Dikmas West Java in 2019 is to improve the management, performance of educators, curriculum, as well as facilities and infrastructure of PAUD and PNF units, to suit with SNP and ready to be accredited by BAN PAUD and PNF. To ensure the achievement of the objectives of the four supervisions, a strategy is carried out by creating scenarios of Phase 1 and Phase 2 activities and the flow of the supervision implementation.

Keywords: *Supervision; accreditation; quality development.*

I. PENDAHULUAN

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (PAUD dan PNF) memiliki peran yang sangat besar dalam memenuhi hak pendidikan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global yang makin nyata. Peran negara dan seluruh komponen masyarakat diperlukan untuk mencapai peningkatan sumber daya manusia tersebut dalam hal penjaminan mutu pendidikan yang baik bagi satuan PAUD dan PNF. Salah satu bentuk penjaminan mutu yang dilanjutkan dengan pengembangan mutu pendidikan adalah melalui pelaksanaan akreditasi satuan PAUD dan PNF yang memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Acuan mutu yang digunakan untuk pencapaian atau pemenuhan mutu pendidikan pada satuan PAUD dan PNF adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar- standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat. Keberhasilan penjaminan mutu pendidikan harus disertai pula dengan melakukan pengembangan mutu pendidikan melalui akreditasi.

Supervisi Akreditasi dalam Rangka Pengembangan Mutu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU tentang Sisdiknas), SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni kriteria yang terhimpun dalam SNP. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik. Lembaga pelaksanaan akreditasi satuan PAUD dan PNF yang dilakukan pemerintah dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF), berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

BAN PAUD dan PNF bersifat independen. Kegiatan akreditasi satuan PAUD dan PNF bertujuan untuk memberikan asesmen secara objektif, transparan, dan berkelanjutan terhadap kelayakan satuan PAUD dan PNF berdasarkan atas kriteria-kriteria yang telah ditetapkan yang mengacu pada SNP. Sasaran akreditasi satuan PAUD dan PNF terdiri atas: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga Kursus dan Pendidikan (LKP), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Untuk memenuhi tuntutan tugas tersebut, satuan PAUD dan PNF dituntut untuk memahami tata cara penyiapan dokumen dan aneka ragam kebutuhan akreditasi.

Keberhasilan pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF melalui akreditasi akan sangat ditentukan oleh faktor sumber daya manusianya. Faktor sumber daya manusia tersebut berupa kemampuan untuk mengembangkan mutu yang hanya dapat dibina melalui pendidikan, sehingga terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan pengembangan mutu program pada satuan PAUD dan PNF agar mencapai SNP. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mempunyai nilai bagi masyarakat yang menggunakannya dan dikaitkan dengan kebutuhan pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian terkait pengembangan mutu melalui akreditasi bagi satuan PAUD dan PNF pada tahun 2019, dengan mengambil studi kasus di Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD dan DIKMAS) Jawa Barat. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut ditemukan beberapa permasalahan dalam pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF, yaitu:

- a. Terbatasnya pendanaan dalam pelaksanaan pengembangan mutu (pemetaan mutu, supervisi di lapangan, dan verifikasi);
- b. Kurang siapnya setiap satuan pendidikan dalam melengkapi berkas dokumen kerja pemenuhan SNP;
- c. Dukungan teknis dan pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sangat terbatas;
- d. Keterlibatan para Penilik yang membidangi satuan PAUD dan PNF terbatas jumlah dan kemampuannya;
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, yang dalam hal ini adalah PP PAUD dan Dikmas serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) masih terbatas jumlah pegawainya dan kompetensinya belum merata; dan
- f. BAN PAUD dan PNF Provinsi masih terbatas anggaran dan tenaga assesornya.

Permasalahan di atas diperkuat dengan data BAN PAUD dan PNF Provinsi Jawa Barat tahun 2019, yang menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Ribuan satuan PAUD dan PNF belum masuk Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan tidak memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- b. Banyaknya satuan pendidikan yang statusnya tidak jelas, illegal, ijazah kesetaraan yang “aspal/asli tapi palsu”, sehingga menimbulkan keraguan bagi lulusannya; dan rendahnya prosentase hasil akreditasi satuan pendidikan di Jawa Barat pada tahun 2019, yakni: a) PAUD: 6% (enam perseratus), terdiri atas 3.131 (tiga ribu serratus tiga puluh satu) satuan terakreditasi dari 52.329 (lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan) satuan; b) PKBM: 16% (enam belas perseratus), terdiri atas 318 (tiga ratus delapan belas) satuan terakreditasi dari 2.001 (dua ribu satu) satuan; dan c) LKP: 17% (tujuh belas perseratus), terdiri dari 463 (empat ratus enam puluh tiga) satuan terakreditasi dari 2.784 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat) satuan.

Supervisi Akreditasi dalam Rangka Pengembangan Mutu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Untuk mengatasi permasalahan di atas, salah satu kebijakan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas pada tahun 2019, berkenaan dengan pengembangan mutu agar sesuai dengan SNP bagi satuan PAUD dan PNF adalah melakukan program supervisi, dengan memberikan tuntunan atau pembinaan sehingga satuan PAUD dan PNF siap diakreditasi. Supervisi secara etimologi berasal dari kata “super” dan “visi” yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. Menurut KBBI (Hasan Alwy, 2005:1107) supervisi adalah pengawasan utama, pengontrolan tertinggi, atau penyelia. Supervisi pendidikan adalah pembinaan berupa tuntunan atau bimbingan menuju perbaikan situasi pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Program supervisi akreditasi dalam rangka pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF agar sesuai dengan SNP sangat penting dilakukan, karena hanya satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi saja yang mendapat beberapa keistimewaan sebagai berikut:

- a. Diberi dana bantuan penyelenggaraan program oleh pemerintah;
- b. Berhak menyelenggarakan ujian kesetaraan tingkat satuan pendidikan; dan
- c. Berhak menyelenggarakan dan menerbitkan sertifikat uji kompetensi.

Berdasarkan data dari PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat (2017), indikator SNP yang harus dipenuhi oleh satuan PAUD dan PNF, memiliki indikator dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator SNP PAUD

Standar	Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan (STTP)	Isi	Proses	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Sarana prasarana	Pengelolaan	Pembiayaan	Evaluasi
Indikator Standar	3	12	10	4	7	17	4	3

Sumber; hasil penelitian

Tabel 2. Indikator SNP PKBM

Standar	Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan (STTP)	Isi	Proses	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Sarana prasarana	Pengelolaan	Pembiayaan	Evalusi
Indikator Standar	3	7	7	6	6	28	5	10

Sumber; hasil penelitian

Tabel 3. Indikator SNP LKP

Standar	Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan (STTP)	Isi	Proses	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Sarana prasarana	Pengelolaan	Pembiayaan	Evalusi
Indikator Standar	3	11	14	6	11	19	5	8

Sumber; hasil penelitian

Melalui penelitian ini diungkapkan program supervisi akreditasi dalam rangka pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF agar sesuai dengan SNP dan siap diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF. Adapun program supervisi yang dipaparkan merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan melalui studi kasus di PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat pada tahun 2019. Gambaran yang telah dipaparkan di atas, pokok permasalahannya adalah supervisi akreditasi dalam rangka pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF agar sesuai dengan SNP dan siap diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF di PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat pada tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan supervisi akreditasi dalam rangka pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF agar sesuai dengan SNP dan siap diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF, yang dilakukan di PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat pada tahun 2019.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015: 13-14). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis dan pendekatan kasus, dengan mengambil studi kasus di PP

PAUD dan Dikmas Jawa Barat pada tahun 2019. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yang diperoleh dari data sekunder. Penggunaan teknik penelitian kepustakaan ini dengan cara menelusuri, mempelajari dan mendalami berbagai dokumen yang bersifat permanen dan tercatat agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Sasaran studi dokumentasi adalah buku-buku yang berhubungan dengan pelaksanaan supervisi akreditasi dan sebagainya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Supervisi akreditasi dalam rangka pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF adalah upaya pembinaan untuk memberikan tuntunan atau bimbingan bagi setiap satuan PAUD dan PNF agar dapat mencapai standar nasional pendidikan dan siap diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat pada tahun 2019, terdapat 4 (empat) program supervisi dalam rangka mengembangkan mutu satuan PAUD dan PNF yang dilakukan, yakni dengan meningkatkan:

1. Pengelolaan satuan pendidikan, khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal;
2. Kinerja pendidik dan tenaga kependidikan sehingga berhasil membantu dan membimbing peserta didik dalam mencapai prestasi belajar yang diharapkan;
3. Kurikulum, proses, dan materi pembelajaran sehingga berdayaguna dan terlaksana dengan baik dalam proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan; dan
4. Sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

Berikut diuraikan masing-masing program supervisi yang dilakukan dalam rangka pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF di PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat pada tahun 2019.

A. Peningkatan Pengelolaan Satuan PAUD dan PNF

Pengelolaan atau manajemen adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Hasil penelitian kepustakaan menunjukkan beberapa

indikator penilaian pada aspek pengelolaan satuan PAUD dan PNF yakni perencanaan, pengembangan program, dan kepegawaian

1. Perencanaan, dengan gambaran sebagai berikut:
 - a. Selama ini penyusunan rencana kerja tidak melibatkan *stakeholder*. Masukan dari *stakeholder* tidak menjadi bahan pertimbangan untuk diselaraskan dengan kebutuhan satuan PAUD dan PNF agar tidak menyimpang dari penetapan awal dan program kerja lembaga;
 - b. Pelaksanaan program kerja belum mencerminkan rencana strategis, karena satuan PAUD dan PNF belum memiliki rencana strategis;
 - c. Pelaksanaan program kerja satuan PAUD dan PNF belum diperbaharui dan diselaraskan dengan rencana kerja awal dan program kerja lembaga; dan
 - d. Program kerja yang disusun sifatnya kurang fleksibel dan setelah pemantauan tidak dapat menyesuaikan dengan kebutuhan lembaga.
2. Pengembangan program, dengan gambaran sebagai berikut:
 - a. *Stakeholder* terkait dan staf tidak terlibat dalam perancangan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program. Perancangan program kerja, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dilaksanakan oleh pendidik satuan PAUD dan PNF yang mendapat tugas dari kepala;
 - b. Perancangan program sudah mencakup kegiatan-kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Tetapi tidak berjalan lancar, karena pendidik disibukan dengan pekerjaan yang sifatnya administratif bukan fungsional sesuai tugasnya; dan
 - c. Temuan-temuan dari proses pemantauan dan evaluasi tidak mempengaruhi rancangan program satuan PAUD dan PNF. Satuan PAUD dan PNF dalam merencanakan program kurang memperhatikan temuan dari lapangan dan evaluasi program akhir tahun. Padahal sangat bermanfaat bagi lembaga dalam menyusun program kerja tahun berikutnya.
3. Kepegawaian, dengan gambaran sebagai berikut:
 - a. Jumlah pegawai yang sedikit tidak sebanding dengan pekerjaan yang banyak;
 - b. Tidak ada uraian jabatan untuk pedoman kerja. Untuk tertib administrasi dan prosedur kerja yang baik, Kepala satuan PAUD dan PNF harus membuat uraian jabatan bagi setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di satuan PAUD

dan PNF. Karena uraian jabatan yang dibuat dan ditetapkan, akan membantu pegawai satuan PAUD dan PNF bekerja; dan

- c. Pimpinan tidak mendorong terciptanya perdebatan dan kerjasama diantara staf. Untuk perdebatan dan kerjasama yang baik diantara staf, pimpinan wajib mendorongnya agar semua unsur yang ada di satuan PAUD dan PNF dapat melahirkan program inovatif dan kreatif.

Fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perencanaan, pengembangan program dan kepegawaian hasil penilaian responden di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan kemampuan manajerial dalam hal tata kelola kelembagaan satuan PAUD dan PNF serta dukungan seluruh unsur yang ada sangat kurang. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidak selarasan dengan teori yang dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard (1982) dalam Sudjana yang memberi arti pengelolaan/manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang serta kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan- tujuan organisasi (Sudjana, 2000:17). Implementasi teori tersebut adalah bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Sudjana menyatakan bahwa:

- a. "Dalam manajemen terjadi kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengelola (pimpinan, kepala, ketua, manajer dsb) bersama orang lain atau kelompok. Terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dan yang dipimpin;
- b. Kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang lain itu diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati bersama; dan
- c. Pengelolaan dilakukan dalam organisasi, sehingga tujuan yang akan dicapai itu adalah tujuan organisasi." (Sudjana, 2000:18).

Ketiga hal tersebut memerlukan kehadiran seorang pengelola/ manajer yang memiliki kemampuan dan keterampilan tentang hubungan kemanusiaan untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Adapun yang dimaksud dengan manajer, Winardi merumuskan pengertiannya sebagai berikut:

“... Manajer adalah seorang yang diberi wewenang formal oleh organisasi formal tertentu, untuk membawahi sejumlah bawahan, untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut, melalui penerapan macam-macam fungsi manajemen, seperti: perencanaan, pengorganisasian, pengisian jabatan-jabatan yang tersedia, memimpin dan menggerakkan (mengaktualisasi) dan melaksanakan pengawasan performa bawahan tersebut” (Winardi, 2009:2).

Selanjutnya pengertian manajemen dikemukakan kembali Winardi yang menyatakan bahwa:

“Manajemen tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh seorang saja dalam melaksanakan semua tugas-tugas pekerjaan tersebut tanpa bantuan orang lain. Manajemen adalah sebuah proses dan memerlukan waktu untuk melaksanakannya. Aktivitas manajemen dilaksanakan secara sistematis dan kegiatannya saling berkaitan tidak berdiri sendiri. (Winardi, 2009:2).”

Manajemen kelembagaan satuan PAUD dan PNF dalam kerangka implementasi tugas pokok dan fungsi adalah agar dapat berlangsung sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan. Tugas pokok dan fungsi masing-masing memiliki arti yang berbeda tetapi saling berkaitan. Tugas pokok secara administrasi diartikan sebagai sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai. Fungsi berkaitan dengan jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan suatu hal. Agar lembaga dapat berjalan sebagaimana mestinya diperlukan jabatan seorang manajer yang mengatur/mengelola lembaga tersebut.

Pengimplementasian tugas pokok dan fungsi satuan PAUD dan PNF adalah dengan memenuhi sasaran atau pelaksanaan pekerjaan utama yang meliputi program kerja berikut pengendalian mutu program satuan PAUD dan PNF. Hal ini penting untuk dicapai agar lembaga bersangkutan berdayaguna dan keberadaannya diperlukan masyarakat serta dapat meningkatkan indeks prestasi manusia. Kemampuan manajerial dalam tata kelola kelembagaan yang efektif dan dinamis yang diperlihatkan oleh manajemen organisasi merupakan unsur dominan dalam penentuan kemungkinan organisasi berhasil mencapai tujuannya.

Pengelolaan satuan PAUD dan PNF sangat bergantung pada karakteristik serta tekad Pimpinan, pendidik dan tenaga kependidikan. Bila ingin maju dan berkembang seoptimal mungkin serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka upaya

yang harus dilakukan segenap pimpinan dan staf satuan PAUD dan PNF adalah membangun sikap kerjasama yang terbuka baik internal maupun dengan pejabat di luar satuan PAUD dan PNF. Berdasarkan hal tersebut maka manajemen yang tepat diterapkan adalah manajemen yang berdasarkan tujuan dan partisipasi. Artinya satuan PAUD dan PNF harus dibawa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam tujuan dan fungsi melalui kerjasama antara pimpinan dan staf dengan dilandasi pengendalian diri yang mantap.

B. Peningkatan Kinerja Pendidik Satuan PAUD dan PNF

Istilah kinerja atau prestasi kerja berasal dari kata *job performance*. Sudrajat menyatakan bahwa kinerja merupakan:

“prestasi kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja diartikan juga sebagai tingkat atau derajat pelaksanaan tugas seseorang atas dasar kompetensi yang dimilikinya” (Sudrajat, 2010:1).

Istilah kinerja tidak dapat dipisahkan dengan bekerja, karena kinerja merupakan hasil dari proses bekerja. Dalam konteks tersebut maka kinerja adalah hasil kerja dalam mencapai suatu tujuan atau persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan. Kinerja dapat dimaknai sebagai ekspresi potensi seseorang berupa perilaku atau cara seseorang dalam melaksanakan tugas, sehingga menghasilkan suatu produk (hasil kerja) yang merupakan wujud dari semua tugas serta tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kinerja dapat ditunjukkan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan staf satuan PAUD dan PNF.

Mencermati uraian di muka maka kinerja diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan. Kinerja pendidik adalah kemampuan atau prestasi kerja yang dicapai oleh seorang pendidik di satuan PAUD dan PNF didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pendidik satuan PAUD dan PNF yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala satuan PAUD dan PNF.

Hasil pengolahan data yang diperoleh dari indikator penilaian pada aspek kinerja pendidik satuan PAUD dan PNF seperti berikut.

- a. Peningkatan mutu layanan, dengan gambaran sebagai berikut:
 - 1) Untuk mengukur indikator keberhasilan/kinerja data dasar dan data dampak dianalisis secara berkala dan ditetapkan untuk setiap tujuan program, tetapi hal itu belum dilakukan;
 - 2) Satuan PAUD dan PNF bekerja sesuai tugas dan fungsinya, hasil dari evaluasi dampak belum digunakan sepenuhnya untuk melakukan penyesuaian program akan datang;
 - 3) Program dan strategi belum secara aktif disampaikan kepada para stakeholder dan penerima manfaat; dan
 - 4) Pimpinan satuan PAUD dan PNF dalam rangka meningkatkan kompetensi staf, dan tanggung jawab pimpinan bagi lembaganya berusaha mendidik para staf dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman staf akan peran dan tanggungjawabnya terhadap lembaga.
- b. Kemitraan, dengan gambaran sebagai berikut:
 - 1) Satuan PAUD dan PNF, bekerja sesuai tugas dan fungsinya merupakan bagian dari lembaga serupa yang lebih besar, seperti SKB lembaga di tingkat kabupaten/kota;
 - 2) Satuan PAUD dan PNF menjalin hubungan bukan dengan lembaga pemerintah saja, tetapi juga dengan lembaga non pemerintah;
 - 3) Pertukaran informasi belum dilaksanakan sebagai partisipasi dalam jaringan membantu lembaga mengembangkan program dan memperbaiki sistem serta prosedur kerja lembaga;
 - 4) Satuan PAUD dan PNF belum berhasil memberikan masukan kebijakan kepada unit pemerintah daerah utama seperti Bappeda dan Sekda, karena performa satuan PAUD dan PNF belum mampu meyakinkan para pejabat daerah.

Secara umum rendahnya kinerja pendidik satuan PAUD dan PNF dalam menyelenggarakan program pendidikan nonformal dan informal unggulan berbasis potensi lokal yang dapat dijadikan contoh dan rujukan oleh masyarakat, merupakan kegagalan yang nyata dari kepemimpinan kepala dalam mengarahkan stafnya, selain

Supervisi Akreditasi dalam Rangka Pengembangan Mutu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

rendahnya komitmen pendidik dan tenaga kependidikan satuan PAUD dan PNF dalam bekerja dan berkarya. Artinya hasil atau prestasi kerja individu berdasarkan pengetahuan, dan keterampilan serta kemampuan kerja tidak nampak dalam bentuk kualitas hasil kerja, dan perilaku kerja yang sesuai dengan prosedur kerja yang ditetapkan oleh lembaga yang tercermin mulai dari bagaimana merencanakan, melaksanakan, menilai dan membimbing serta membuat laporan pelaksanaan kerja di wilayah kerjanya tidak dapat dicapai.

Secara esensial terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja pendidik satuan PAUD dan PNF, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau berasal dari diri sendiri, yang berhubungan dengan kemampuan mengembangkan diri, pengetahuan dan sikap yang dimiliki, motivasi dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh pihak lain, yaitu pimpinan setempat, tempat kerja, lingkungan kerja, dan mekanisme kerja. Timpe mengatakan bahwa terdapat faktor-faktor mata rantai kinerja yang saling bergantung satu sama lainnya (Timpe, 2002:132). Kinerja akan terganggu manakala ada satu mata rantai yang lemah diantara mata rantai tersebut.



Gambar 1 : Faktor-faktor mata rantai kinerja
Sumber : A. Dale Timpe (2002:132)

Contoh dari faktor-faktor mata rantai tersebut, meskipun tugasnya jelas, kinerja individu mungkin di bawah standar bila dia kekurangan sumber daya atau alat. Atau, meskipun sumber daya tersedia dan akibat-akibatnya dapat diterima, kinerja berada di bawah standar bila individu tidak cukup terlatih.

Penting sekali Kepala satuan PAUD dan PNF memahami bahwa pendidik dan tenaga kependidikan sebagai individu adalah satu mata rantai dalam rantai ini dan produktivitas optimal/pengembangan mutu adalah hasil dari semua mata rantai yang ada dan efektif dalam rantai tersebut. Yang lebih penting semua unsur harus memahami bahwa mata rantai yang paling kecil kemungkinannya untuk gagal biasanya adalah individu.

Pemahaman tentang pentingnya mata rantai ini akan sangat membantu, karena memuat sejumlah faktor yang sering dipandang sebagai fenomena terpisah dan menunjukkan hubungan, dan selanjutnya beberapa strategi yang secara sistematis mendiagnosis dan memperbaiki masalah-masalah kinerja/produktivitas. Kita memiliki cara yang bermanfaat untuk melihat produktivitas individu dan produktivitas lembaga.

Rantai kinerja ada dan selalu bekerja, suka atau tidak. Semua kinerja ditentukan oleh efektivitas keseimbangan antara pekerja individu dan lingkungan yang berada di dekatnya. Di samping itu, kinerja atau produktivitas manusia akan dapat diperbaiki dalam jangka panjang hanya melalui perubahan yang hati-hati dan bijaksana dalam komponen-komponen rantai kinerja.

Bagi para Kepala satuan PAUD dan PNF, hal ini berarti bahwa mereka penting memahami komponen-komponen dasar ini dan hubungannya. Lebih jauh lagi, mereka harus mengelola komponen-komponen dasar ini bila kinerja/produktivitas harus menjadi kenyataan. Karena itu rantai kinerja ini memiliki implikasi luas bagi manajemen secara keseluruhan. Kendati demikian, kita akan berkonsentrasi hanya pada dua penggunaan spesifik dari mata rantai kinerja ini yaitu mengelola masalah-masalah kinerja dan mengelola perubahan

Terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja pendidik satuan PAUD dan PNF, antara lain:

Supervisi Akreditasi dalam Rangka Pengembangan Mutu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

- a. Pengembangan diri, hal ini dilakukan dengan cara belajar sendiri, mencari informasi terbaru, membiasakan diri terhadap satu pekerjaan serta meningkatkan disiplin dalam tugas dan pekerjaannya;
- b. Pelatihan dan orientasi, hal ini dilakukan melalui pelatihan dan orientasi, yang dapat lebih meningkatkan mutu pelaksanaan tugas operasional di lapangan;
- c. Pembinaan, hal ini dilakukan melalui kunjungan langsung atau dengan bimbingan teknis atau melalui petunjuk operasional dan buku-buku yang mendukung terhadap pekerjaan; dan
- d. Pemberian penghargaan, hal ini dapat memunculkan motivasi kerja dan peningkatan mutu pelaksanaan tugas di lapangan.

C. Peningkatan Kurikulum satuan PAUD dan PNF

Untuk mengukur keberhasilan implementasi tugas pokok dan fungsi satuan PAUD dan PNF tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Parasuraman (1990) dalam Wasliman menyatakan bahwa sifat-sifat pokok mutu jasa mengandung unsur *tangibles* (bukti fisik), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan), dan *empathy* (empati) (Wasliman, 2009: 3-4). Kelima unsur tersebut, dalam hal pengimplementasian di satuan PAUD dan PNF dapat digambarkan sebagai berikut.

- a. *Tangible* (bukti fisik), yaitu penampilan fisik, peralatan, materi komunikasi, SDM/PTK, dan sarana prasarana pendidikan. Misalnya, fasilitas pembelajaran seperti gedung, media pembelajaran dan lain sebagainya;
- b. *Reliability* (keandalan), yaitu kemampuan memberikan pelayanan dengan tepat dan terpercaya seperti yang dijanjikan dengan segera atau cepat, akurat, dan memuaskan. Misalnya, mata ajar yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, jadwal pembelajaran, proses pembelajaran yang akurat, penilaian yang objektif, bimbingan dan penyuluhan, serta aktivitas lain yang semuanya untuk memperlancar proses pembelajaran peserta didik;
- c. *Responsiveness* (daya tanggap), yaitu keinginan/kemauan/kesediaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk membantu atau menolong peserta didik dan

memberikan pelayanan yang cepat. Misal, prosedur manajemen lembaga pendidikan sederhana;

- d. *Assurance* (jaminan), yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, respek terhadap peserta didik, serta memiliki sifat dapat dipercaya, bebas dari bahaya dan keragu-raguan. Misalnya, pimpinan satuan PAUD dan PNF, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan harus benar-benar kompeten di bidangnya sehingga reputasi lembaga pendidikan positif di mata masyarakat; dan
- e. *Empathy* (empati), yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi dengan baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan peserta didiknya. Misalnya, pendidik dan tenaga kependidikan mengenal peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran.

Pengembangan satuan PAUD dan PNF perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan menuju SNP. Hal ini dimaksudkan agar satuan PAUD dan PNF dapat memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik sesuai SNP. Adanya standarisasi satuan PAUD dan PNF ini, maka peserta didik diharapkan dapat menerima pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan 8 SNP yang telah ditetapkan pemerintah.

D. Peningkatan Sarana dan prasarana satuan PAUD dan PNF

Bafadal menyatakan bahwa sarana pendidikan baik untuk formal maupun nonformal, adalah:

“Semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan” (Bafadal, 2004:2).

UU tentang Sisdiknas mengatur bahwa standar sarana dan prasarana merupakan SNP yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Adapun yang dimaksud dengan standar sarana dan prasarana berdasarkan UU tentang Sisdiknas mencakup ruang

belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana pendidikan adalah semua peralatan atau fasilitas yang langsung maupun tidak langsung digunakan dalam proses belajar mengajar agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Fasilitas pendidikan adalah semua kebutuhan baik yang bersifat fisik maupun material yang diperlukan oleh peserta didik dalam rangka untuk memudahkan, melancarkan, dan menunjang terselenggaranya proses belajar mengajar, sehingga proses pembelajaran lebih efektif dan efisien dengan hasil belajar yang memuaskan.

Dengan tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai diharapkan peserta didik akan memperoleh hasil yang baik. Dengan demikian fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang ada di satuan PAUD dan PNF penting artinya guna menunjang kesuksesan pencapaian tujuan atau program kerja yang telah ditetapkan.

Namun berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai dari beberapa indikator yang hasilnya di bawah rata-rata. Adapun beberapa gambaran tentang permasalahan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan terkait fasilitas sarana pendidikan, berupa bahan ajar yang ada belum cukup dan kurang memenuhi standar, sehingga harus dipenuhi dan fasilitas prasarana pendidikan, berupa tidak ada ruang khusus untuk ibadah dan lapang olahraga di satuan PAUD dan PNF, sehingga harus dibangun.

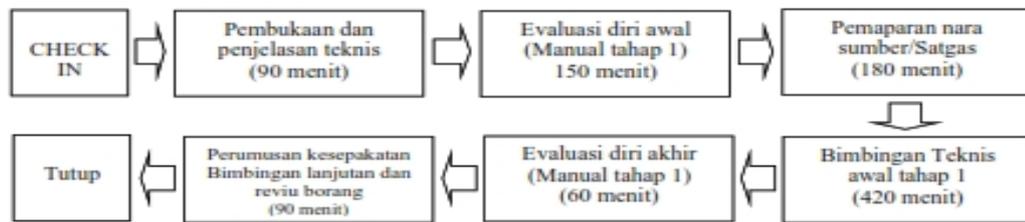
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar satuan PAUD dan PNF telah memiliki sarana dan prasarana pendidikan walaupun kurang memadai untuk mendukung pencapaian tujuan lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal dan nonformal. Standar sarana dan prasarana yang belum memenuhi kriteria yakni ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, perlu diperbaiki sehingga sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Untuk menjamin ketercapaian tujuan keempat supervisi akreditasi yang telah diuraikan diatas, terdapat strategi yang digunakan oleh PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat yakni sebagai berikut:

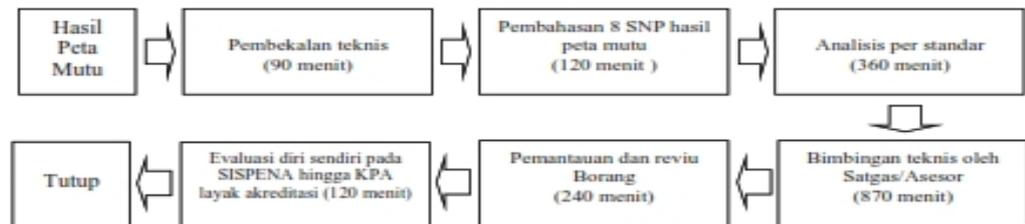
- a. Melakukan sosialisasi dan pembinaan secara langsung terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh Kasi, Penilik dan Pengawas agar dapat memecahkan masalah yang dihadapi.
- b. Melakukan pertemuan kelompok (2-5 satuan PAUD dan Dikmas) yang melibatkan para pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki permasalahan yang relatif sama sehingga dapat mencari solusi bersama dilakukan dengan 2 (dua) tahap. Tahap 1 (satu) satuan PAUD dan PNF (PAUD, LKP, dan PKBM) dihimpun pada satu tempat dengan kegiatan pertemuan (sosialisasi/orientasi) bagi pengelola dan pendidik satuan PAUD dan PNF selama dua hari dengan melibatkan narasumber, pendamping dan asesor PAUD, LKP dan PKBM. Sedangkan kegiatan Tahap 2 (dua), pembimbingan sekaligus reviu borang (dokumen) akreditasi PAUD, LKP, dan PKBM oleh asesor PAUD, LKP, dan PKBM hingga satuan PAUD dan Dikmas dapat melakukan Evaluasi Diri Sendiri (EDS) dengan lengkap dan benar pada Sistem Penilaian Akreditasi (SISPENA) dan berkas Kelengkapan Permohonan Akreditasi (KPA) dinyatakan layak. Kegiatan Tahap 2 (dua) dikoordinasikan oleh Disdik Kabupaten Bandung Barat.
- c. Pembimbingan melalui media aplikasi SISPENA.
- d. Melakukan koordinasi dan komunikasi melalui media elektronik telepon/*WhatsApp*/surat elektronik dengan narasumber agar permasalahan yang timbul langsung dapat direspon.
- e. Satuan PAUD dan PNF melakukan simulasi akreditasi dan melibatkan penilik, pengawas dan asesor.
- f. Penilik atau pengawas memiliki dokumen guna mencatat tentang permasalahan dan kemajuan pemberkasan akreditasi satuan PAUD dan PNF.
- g. Dilakukan monitoring oleh narasumber paling sedikit satu kali selama kegiatan pendampingan lanjutan (Tahap 2) berlangsung.

Berikut skenario kegiatan Tahap I dan Tahap 2 serta alur pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat.

Supervisi Akreditasi dalam Rangka Pengembangan Mutu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

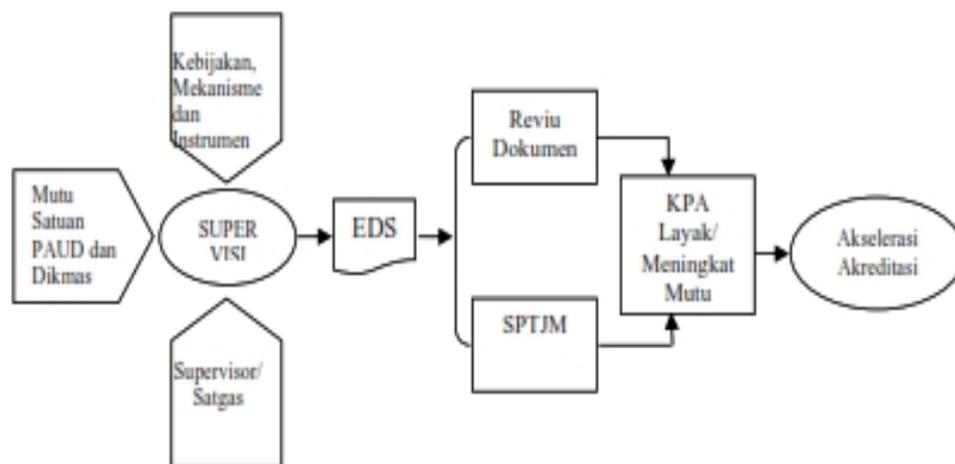


Bagan 1. Skenario Kegiatan Tahap 1



Bagan 2. Skenario Kegiatan Tahap 2

Gambar 2. Skenario Kegiatan Tahap 1 dan Tahap 2



Bagan 3. Alur Pelaksanaan Supervisi

Gambar 3. alur pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat

IV. KESIMPULAN

Supervisi akreditasi dalam rangka pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF yang dilakukan di PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat pada tahun 2019 adalah dengan melakukan peningkatan pada pengelolaan, kinerja pendidik, kurikulum, serta sarana dan

prasarana dari satuan PAUD dan PNF, agar sesuai dengan SNP dan siap diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF. Untuk menjamin ketercapaian tujuan keempat supervise tersebut dilakukan strategi dengan membuat scenario kegiatan Tahap 1 dan Tahap 2 serta alur pelaksanaan supervisinya. Hendaknya setiap program supervisi dilaksanakan dengan baik oleh setiap satuan PAUD dan PNF untuk dapat mengembangkan mutu pendidikannya sehingga sesuai dengan SNP dan siap untuk diarekditasi, dengan tetap memperhatikan setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Bafadal, Ibrahim. 2004. *Manajemen Perlengkapan Sekolah, Teori dan Aplikasinya*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta, Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (2017). *Bahan Supervisi Satuan PAUD dan Dikmas*. Bandung: PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat.
- , 2018. *Panduan Pelaksanaan Supervisi Satuan PAUD dan Dikmas*. Bandung, PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat.
- , 2019. *Laporan Pelaksanaan Supervisi Satuan PAUD dan Dikmas*. Bandung, PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat.
- Efgivia, M. Givi. 2020. Pemanfaatan Big Data dalam Penelitian Teknologi Pendidikan. *Educate: Jurnal Teknologi Pendidikan*. Vol 5, No. 2.
- Sudjana, D. 2000. *Manajemen Program Pendidikan untuk PLS dan Pengembangan SDM*. Bandung, Falah Production.
- Sudrajat, Akhmad. 2010. *Kepemimpinan dan Kinerja*. Website: www.AKHMAD SUDRAJAT.Blogspot.com.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Timpe, A. Dale. 2002. *Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Kinerja*. Jakarta, Gramedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang: Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta, BP Cipta Karya.

Supervisi Akreditasi dalam Rangka Pengembangan Mutu Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Wasliman, Iim. 2009. Kebijakan Anggaran Pendidikan dan Pengembangan Mutu Pendidikan. *Materi Perkuliahan Manajemen Pendidikan Program S3*. Bandung, UNINUS.

Winardi, J. 2009. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.